



# Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengembangkan Wisata Pantai Tabanio Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan

Rizqita Shelin Ayudia<sup>1</sup>, Tomi Oktavianor<sup>1</sup>

1. Banjarmasin, Indonesia

\*Corespondence author: rizqitashelinayudia2727@gmail.com

**Abstract.** Community-based tourism is a tourism management concept that prioritizes active community participation with the aim of providing welfare for them while maintaining environmental quality, and protecting their social and cultural life. The purpose of this research is to conduct an analysis of community empowerment in developing Tabanio beach tourism in Tanah Laut Regency, South Kalimantan. The type of research used is descriptive qualitative with in-depth interview techniques. The research instrument is the researcher with informants consisting of; Head of Tourism Office, Village Head, Village community, Pokdarwis Tabanio Beach, and visitors. The results of the study indicate that; community empowerment in developing tourism in Tabanio Beach at 1) the awareness and behavior formation stage towards conscious behavior and requiring increased self-capacity has not been implemented properly or optimally, 2) the transformation stage of abilities in the form of knowledge insight, skills, basic skills has not been implemented properly or optimally, 3) the stage of increasing intellectual abilities, skills, skills has never been implemented. Thus, community empowerment in developing Tabanio beach tourism in Tanah Laut Regency, South Kalimantan has not been implemented optimally. Therefore, the role of related parties is further enhanced, so that community empowerment in developing Tabanio Beach tourism in Tanah Laut Regency can run well and optimally.

**Keyword:** community empowerment; community based tourism; tabanio beach

## How to Cite:

Ayudia, R. S., & Oktavianor, T. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengembangkan Wisata Pantai Tabanio Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 133-141. DOI: <https://doi.org/10.22225/pi.10.2.2025.133-141>

## 1. Pendahuluan

Proses pengembangan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan pada pemetaan kemungkinan sumber daya wilayah yang ada dan pemberdayaan masyarakat setempat (Herdiana, 2019). Pemberdayaan mengacu pada kemampuan atau kapasitas masyarakat, terutama kelompok rentan dan mereka yang berpendidikan dan berpenghasilan rendah, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara yang memungkinkan mereka bebas, dalam arti bahwa mereka tidak hanya memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri mereka, tetapi juga bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan (Suharto, 2014).

Salah satu konsep yang menjelaskan peranan masyarakat dalam pembangunan pariwisata adalah pariwisata berbasis Masyarakat. Munculnya permasalahan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat merupakan kritik atas pengelolaan wisata yang dilaksanakan tanpa melibatkan masyarakat dan dipandang kurang mampu memberdayakan masyarakat. Pariwisata berbasis masyarakat merupakan konsep pengelolaan kepariwisataan dengan mengedepankan partisipasi

aktif masyarakat dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi mereka dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, serta melindungi kehidupan sosial dan budayanya (Manurung & Rahmayani, 2022).

Program pengembangan pariwisata berbasis masyarakat memerlukan kebijakan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Kebijakan tersebut bertujuan agar pengembangan pariwisata dapat berfungsi secara optimal berbasis pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pengembangan inisiasi perencanaan kebijakan, implementasi dan evaluasi, pengembangan program desa wisata yang unik dari potensi alam, budaya dan masyarakat, dan kebijakan untuk membentuk forum pariwisata masyarakat (Gama dkk., 2018). Namun permasalahannya keikutsertaan masyarakat ini sangat dipengaruhi oleh kemauan, kesempatan, dan kemampuan dari masyarakat tersebut. Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan desa wisata dapat mendorong mereka berpartisipasi lebih aktif dalam perencanaan dan pengawasan (Hannaji, 2022).

Daerah pesisir pantai menjadi salah satu daerah yang strategis untuk dikelola sebagai kawasan wisata dalam rangka memenuhi hajat hidup masyarakat, terutama berkaitan dengan pembangunan ekonomi yang dapat menunjang perekonomian masyarakat sekitar, pemerintah daerah maupun pihak-pihak lainnya. Pengelolaan daerah pesisir tentu saja melibatkan banyak pemangku kepentingan, sehingga berbagai kepentingan pun bertemu atas nama pembangunan daerah pesisir.

Berbagai penelitian tentang strategi pemberdayaan masyarakat berbasis pengembangan wisata pantai berbasis masyarakat telah dilakukan yang diantaranya dilakukan oleh Sinaga dkk., (2021) yang melaporkan, bahwa pemberdayaan masyarakat yang utamanya untuk mendukung efektifitas dan efisiensi program pengembangan wisata di Pantai Cermin tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Sementara Santoso (2022) melaporkan, bahwa pemantapan masyarakat desa melalui program wisata yang dilaksanakan di Desa Kandri Kecamatan Gunungpat terlaksana dengan baik. Pemerintah berupaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata dengan menyediakan sarana dan prasarana serta pengembangan sumber daya manusia yang diperlukan dilakukan oleh pemerintah desa Kandri. Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut, terlihat bahwa pemberdayaan Masyarakat pada pengembangan wisata Pantai belum tentu berjalan dengan baik.

Pantai Tabanio ini merupakan salah satu pantai yang dimiliki oleh kabupaten Tanah Laut yang terletak di Kecataman Takisung memiliki sumber daya alam yang berpotensi besar sebagai kawasan rekreasi atau pariwisata. Saat ini pantai Tabanio mulai dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu tempat untuk melakukan kegiatan wisata yang cukup menarik. Jumlah pengunjung yang mendatangi kawasan wisata pantai Tabanio pada tahun 2024 dan sampai petengahan tahun 2025 cukup banyak dengan rata-rata perbulan adalah 2.100 pengunjung. Sebagai salah satu objek wisata yang belum lama dikenal oleh banyak orang, pantai Tabanio dihadapkan pada tantangan untuk dapat menarik hati para wisatawan agar mau berkunjung, untuk itulah setiap pelaku wisata harus terus melakukan pengembangan dan perbaikan fasilitas-fasilitas yang ada. Wisata pantai Tabanio Kabupaten Tanah Laut dikelola oleh masyarakat melalui kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Desa Tabanio dengan melibatkan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu adanya penelitian yang terkait dengan sejauhmana pemberdayaan masyarakat mengembangkan wisata pantai Tabanio Kabupaten Tanah Laut yang

nantinya dapat digunakan sebagai acuan dalam upaya meningkatkan kwalitas wisata Pantai Tabanio dimasa yang akan datang.

## 2. Konsep

### **Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Parsons (Suharto, 2014), pemberdayaan masyarakat berarti memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berkreasi dengan kemampuannya untuk menciptakan sesuatu yang dapat meningkatkan kesejahteraannya. Hasil akhir proses pemberdayaan adalah suatu keberdayaan. Adapun parameter keberdayaan adalah: a) derajat kesadaran dan kemauan untuk berubah (kekuasaan); b) kemampuan untuk meningkatkan kapasitas akses (daya internal); c) kemampuan menghadapi hambatan (*power to over*); d) tingkat kerjasama dan solidaritas (dengan kekuasaan).

Tujuan penguatan atau pemberdayaan Masyarakat adalah: 1) Memperbaiki kelembagaan (*better Institution*): Dengan memperbaiki tindakan yang dilakukan, diharapkan kelembagaan menjadi lebih baik. Institusi yang baik mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan; usaha dilakukan agar dapat membawa manfaat bagi anggota lembaga dan masyarakat sekitar; 2) Peningkatan Pendapatan (*Better Income*) Perbaikan usaha diharapkan dapat meningkatkan pendapatan seluruh anggota lembaga, termasuk masyarakat. (*more good environment*), peningkatan pendapatan bertujuan untuk memperbaiki lingkungan fisik dan sosial, karena kerusakan lingkungan sering disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan rendah; 3) kehidupan yang lebih baik (*better life*), pendapatan yang lebih baik dan lingkungan yang baik meningkatkan taraf hidup masyarakat. dapat dilihat dari tingkat kesehatan, pendidikan dan daya beli; 4) Meningkatkan masyarakat (*a better community*). Ketika setiap keluarga memiliki kehidupan yang baik, maka akan ada juga kehidupan masyarakat yang lebih baik Mardikanto (Maryani dan Nainggolan, 2019).

Tahapan pemberdayaan Masyarakat yang harus dilalui menurut Sulistiyan (2004) dan Sumodingningrat (2014) meliputi:

Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan membutuhkan peningkatan kapasitas diri.

Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan.

Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan kepada kemandirian.

### **Pengelolaan Wisata**

Menurut Cox (Pitana, 2009), pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut: 1) Pembangunan serta pengembangan pariwisata harus berdasarkan pada kearifan lokal yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungannya. 2) Preservasi, proteksi dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan pariwisata. 3) Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasan budaya lokal. 4) Memberikan dukungan serta legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika memberikan manfaat positif.

Konsep pengembangan pariwisata menurut Sunaryo (2004) adalah berbagai pemahaman mengenai destinasi pariwisata seperti halnya diadaptasikan dari berbagai pengertian yang telah

diberikan oleh para ahli, pada intinya mengandung tujuan yang sama yaitu menekankan komponen-komponen utama sebagai berikut; 1) Objek dan daya tarik (atraksi) yang berbasis utama pada kekayaan alam, budaya, maupun buatan. 2) Aksesibilitas, sarana dan prasarana yang mendukung pergerakan wisatawan. 3) Amenitas, fasilitas pendukung dan penunjang wisata yang meliputi: rumah makan, akomodasi, fasilitas penukaran uang, cinderamata, pusat informasi wisata, agen perjalanan dan fasilitas kenyamanan lainnya. 4) Fasilitas pendukung, yaitu yang digunakan oleh wisatawan seperti bank, telekomunikasi, pos, layanan kesehatan, dan sebagainya 5) Kelembagaan, yaitu suatu integritas antara pemerintah, organisasi, pelaku pariwisata guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan

### 3. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara mendalam. Penelitian ini dilakukan di kawasan wisata Pantai Tabanio kabupaten Tanah Laut Maret-Juli 2025 yang dikelola masyarakat. Instrumen penelitian adalah; 1) Peneliti, 2) Pedoman wawancara (*Interview Guide*) dan 3) Alat penunjang atau pendukung lainnya. Data tentang pemberdayaan masyarakat mengacu pada tahapan menurut Sulistiyan (2004) dan Sumodingningrat (2014) meliputi: 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku, 2) Tahap transformasi kemampuan, 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan. Sumber data adalah; 1) Data Primer (Peristiwa, dua tipe informan, yaitu informan kunci dan informan pendukung). 2) Data Sekunder; gambar, rekaman wawancara, tabel dan lain-lain). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Wawancara Dinas Parawisata, Kepala Desa, Ketua Pengelola Pokdarwis, masyarakat sekitar kawasan objek wisata dan wisatawan. Data dianalisis dengan menggunakan empat tahap dari Miles & Huberman (2013), yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan adalah penarikan kesimpulan-dan verifikasi.

### 4. Hasil dan Pembahasan

Menurut Parsons (Suharto, 2014) pada dasarnya pemberdayaan adalah membantu klien untuk memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial. Pemberdayaan masyarakat tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target mampu untuk mandiri dan dilepas untuk mandiri, dengan demikian pemberdayaan melalui satu proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap.

Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan membutuhkan peningkatan kapasitas diri.

Penelitian menemukan, bahwa kegiatan penyadaran dan pembentukan perlaku menuju perilaku sadar dan membutuhkan peningkatan kapasitas diri *belum berjalan dengan baik* atau *belum maksimal*. Hal tersebut disebabkan karena sosialisasi dan pembelajaran terhadap masyarakat hanya dilakukan di awal akan dibukanya pantai Tabanio sebagai kawasan wisata. Seharusnya kegiatan ini dilakukan secara berkelanjutan, karena hal tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar wawasan mereka tentang manfaat yang akan diperoleh oleh aktifitas wisata di daerah mereka bertambah baik. Seperti yang dinyatakan oleh Freire (1972), bahwa penyadaran adalah belajar memahami kontradiksi sosial, politik dan ekonomi serta mengambil tindakan untuk

melandu unsur-unsur yang menindas dari realitas tersebut, penyadaran merupakan kunci untuk mendorong dan membantu rakyat membebaskan diri sendiri. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap.

Penelitian ini juga menemukan, bahwa sebagian besar masyarakat menyadari wisatawan memerlukan berbagai pelayanan atau jasa saat berkunjung ke pantai Tabanio. Kesadaran tersebut akan digunakan sebagai momen terbukanya lapangan perkerjaan sebagai pemberi jasa. Masyarakat juga menyadari, bahwa wisatawan yang datang ke Pantai Tabanio akan membutuhkan makanan atau oleh-oleh yang bisa dibawa pulang setelah dari tempat wisata pantai Tabanio. Selain itu masyarakat juga menyadari, bahwa mereka akan menjadi bagian dari pelatihan wisata edukasi yang nantinya akan menjadi narasumber dalam wisata edukasi bagi pengunjung khususnya anak sekolah. De Lima (2019) yang menyatakan, bahwa sosialisasi tentang Sadar Wisata secara berkelanjutan sangat diperlukan terhadap Masyarakat di Kawasan wisata agar kesadaran akan potensinya dapat meningkat. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Wahyuni (2018) dan Agung, dkk (2024) yang menyatakan, bahwa masyarakat harus diberikan pemahaman, pengetahuan, motivasi, maupun pencerahan terhadap proses pemberdayaan berasal dari diri sendiri dan agar masyarakat mampu menghadapi berbagai permasalahan.

Fase pembentukan kesadaran dan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli memerlukan peningkatan kemampuan diri sendiri sangat diperlukan dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat (Sumodingningrat, 2014). Hal ini akan membentuk kemandirian dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, sehingga akan berpengaruh terhadap perilaku masyarakat yang akan lebih baik dalam hal pelayanan. Dengan demikian saat pelayanan menjadi semakin lebih baik, maka dapat dipastikan bahwa pelaksanaan penumbuhan kesadaran telah dilaksanakan dan hal ini akan dapat dilihat dari penilaian wisatawan yang berkunjung.. Hal tersebut ditunjukkan oleh tanggapan yang diberikan oleh wisatawan, bahwa masyarakat dan pengelola kawasan wisata pantai Tabanio menampilkan sikap yang ramah, sopan, dan menghargai pengunjung saat di kawasan wisata.

Seperti yang dilaporkan oleh Anarta & Darwis (2024), bahwa membangun hubungan yang baik antara masyarakat setempat dan wisatawan adalah hasil dari pengembangan desa wisata yang melibatkan partisipasi masyarakatnya. Dengan keterlibatan masyarakat, mereka dapat memahami kebutuhan dan keinginan wisatawan, memberikan pengalaman wisata yang lebih berkualitas dan berkesan. Pemahaman ini menciptakan hubungan yang positif antara kedua pihak, meningkatkan kepuasan wisatawan, dan pada akhirnya, mendukung keberlanjutan desa wisata melalui dukungan dan kunjungan berulang.

Oleh sebab itu upaya untuk meningkatkan pembentukan kesadaran dan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah yang dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, Pemerintah Desa, pengelola Pokdarwis, perguruan tinggi, pihak swasta, dan pemangku kepentingan yang lainnya.

Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan

Menurut Chaplin (1997), *Ability* (kemampuan, kecakapan, ketangkasan, bakat, kesanggupan) merupakan tenaga (daya kekuatan) untuk melakukan suatu perbuatan. Sementara Robbins (2000) menyatakan, bahwa kemampuan bisa merupakan kesanggupan bawaan sejak lahir, atau merupakan hasil latihan atau praktik. Berdasarkan pengertian-pengertian

tersebut dapat disimpulkan, bahwa kemampuan (*ability*) adalah kecakapan atau potensi menguasai suatu keahlian yang merupakan bawaan sejak lahir atau merupakan hasil latihan atau praktik dan digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang diwujudkan melalui tindakannya.

Penelitian ini menemukan, bahwa pelaksanaan peningkatan kemampuan bagi masyarakat dalam hal pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah khususnya Dinas Pariwisata *belum diimplementasikan secara baik dan maksimal*. Kegiatan yang dilakukan mulai dari dengan memberikan pelatihan bagi masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan peningkatan kapasitas seperti pelatihan pemandu wisata, pelatihan pembuatan kerupuk dan pentol berbahan ikan laut, pelatihan pengelolaan *homestay*, pelatihan pembuatan cenderamata belum berjalan maksimal, akan tetapi masyarakat secara mandiri melakukannya. Meskipun demikian jumlah pengunjung yang mendatangi kawasan wisata pantai Tabanio pada tahun 2024 cukup banyak dengan rata-rata perbulan adalah 2.100 pengunjung. Kasus seperti ini juga dilaporkan oleh Simamora & Rangkuti (2024) terhadap pemberdayaan masyarakat pada pengembangan Desa Wisata di Nagori Karang Anyar, walaupun dalam pelaksanaannya sudah meningkatkan wisatawan, tetapi dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang mengakibatkan kurang efektivitasnya pengembangan kegiatan yang dilaksanakan.

Menurut Anarta & Darwis (2024) berbagai langkah untuk meningkatkan keterlibatan serta memberdayakan masyarakat dalam sektor pariwisata yang berfokus pada keterlibatan masyarakat perlu dilakukan agar desa wisata mampu berkembang. Dengan adanya masyarakat yang berpartisipasi aktif dapat meraih manfaat ekonomi, seperti peluang berusaha di sektor pariwisata dan lapangan kerja terkait. Dengan merasa memiliki peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan desa wisata, keterlibatan masyarakat menjadi kunci penting dalam mencapai tujuan tersebut.

Peran Universitas Lambung Mangkurat yang melaksanakan kegiatan berupa kegiatan pengabdian masyarakat yang didalamnya terdapat kegiatan pelatihan-pelatihan maupun pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia sangat membantu dalam tahap ini, dimana kegiatan ini juga diharapkan mampu menjadikan masyarakat di destinasi wisata dapat menerima manfaat pemberdayaan dengan cara meningkatkan kemampuan bagi masyarakat di sekitar destinasi wisata Pantai Tabanio.

Begitu juga dengan pelibatan pihak perusahaan melalui *CSR* juga belum ditemukan. Seharusnya keberadaan Perusahaan di sekitar Pantai Tabanio dituntut untuk turut menyelesaikan masalah-masalah sosial dimana perusahaan tersebut berada. Sebab melalui *CSR* perusahaan dapat meningkatkan kesadaran sosial masyarakat tentang isu-isu penting seperti kesejahteraan, hak asasi manusia, dan keberlanjutan. Perusahaan yang melibatkan masyarakat dalam berbagai program *CSR* sering kali memotivasi individu untuk berkontribusi lebih dalam memecahkan masalah sosial yang ada. Oleh sebab itu pemerintah dalam hal ini melakukan koordinasi dengan perusahaan-perusahaan tersebut dalam menyalurkan *CSR*-nya untuk masyarakat Tabanio dalam membantu mengembangkan Kawasan Pantai Tabanio sebagai destinasi wisata Pantai.

Penelitian ini juga menemukan, bahwa sistem manajemen pelayanan wisata pantai Tabanio yang dilakukan secara konvensional dengan mengandalkan kemampuan yang ada di Masyarakat Desa Tabanio. Kondisi yang demikian akan memberikan dampak lambatnya pengembangan destinasi wisata pantai Tabanio untuk bisa mensejajarkan diri dengan wisata pantai-pantai lain di Kabupaten Tanah Laut. Oleh sebab itu diperlukan peningkatan kemampuan mengadakan jejaring baik ke pemerintah, perguruan tinggi, maupun pihak perusahaan swasta dalam upaya pengembangan wisata pantai Tabanio sebagai destinasi wisata yang dapat memenuhi permintaan

wisatawan ke depan. Hal tersebut sangat penting dilakukan, seperti yang disampaikan oleh Maulana, dkk (2022) dan Suherman dkk (2024), bahwa kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta, akademisi dan masyarakat perlu diperkuat yang menjadi faktor pendukung untuk memastikan pengembangan pariwisata memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak. Hal serupa juga rekomendasikan oleh hasil penelitian Mulyana (2023), bahwa program pelatihan dan pendampingan dalam penatakelolaan Desa Wisata yang terpenting adalah adanya peran serta dari seluruh elemen yang ada seperti Masyarakat, pemerintah dan investor dalam pengembangan Desa Wisata.

Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan, sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan kepada kemandirian.

Keith Davis dalam Mangkunegara (2000) menyatakan, bahwa secara psikologis kemampuan (*ability*) terdiri dari kemampuan potensi dan kemampuan *reality (knowledge + skill)*, artinya karyawan yang memiliki potensi di atas rata-rata dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah mencapai kinerja maksimal.

Penelitian terkait dengan tahap peningkatan kemampuan intelektual kepada masyarakat desa Tabanio, bahwa baik pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata, Pemerintah Desa, dan Pengelola Pokdarwis *belum pernah melakukan kegiatan tersebut*. Oleh sebab itu guna meningkatkan kemampuan intelektual kepada masyarakat desa Tabanio, pihak-pihak terkait dapat melakukan kegiatan studi tiru masyarakat Tabanio khususnya kepada pengelola Pokdarwis Wisata Bahari Desa Tabanio ke suatu desa wisata atau obyek wisata di daerah lain khususnya wisata pantai yang telah berkembang dengan baik. Selain itu upaya melakukan pelatihan kompetensi terhadap pengelola Pokdarwis juga sangat diperlukan agar pemberdayaan masyarakat dalam tahap ini akan menambah *Skill* bagi masyarakat dalam hal memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada wisatawan yang berkunjung ke tempatnya, sehingga pemberdayaan masyarakat pada tahap ini akan menghasilkan kemandirian yang signifikan bagi perkembangan pariwisata pada wilayah Desa Tabanio dimana masyarakatnya agar semakin inovatif dalam menghasilkan pelayanan jasa Pariwisata.

Meningkatnya kemampuan sumbar daya manusia dalam bidang pelayanan, Jasa dan lainnya akan semakin menarik wisatawan datang ke tempat wisata di Desa Tabanio. Hal ini akan meningkatkan kemandirian dalam pengembangan destinasi wisata, semakin mandiri suatu destinasi wisata maka akan semakin terlihat peningkatan pemberdayaan masyarakat di sekitar destinasi yang dikembangkan, hal ini juga menunjukkan program yang dicanangkan oleh pemerintah berjalan dengan baik dan dapat dikembangkan di destinasi wisata lainnya di Kabupaten Tanah Laut. Seperti yang dilaporkan oleh Natalia, dkk (2023), bahwa tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan kerampilan sangat diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini, maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan. Oleh sebab itu perlunya wawasan yang luas yang menjadi pokok utama dari pendidikan itu sendiri.

## 5. Simpulan

Pemberdayaan masyarakat dalam program pengembangan pariwisata berbasis masyarakat pada destinasi wisata di Pantai Tabanio Kabupaten Tanah Laut pada: a) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan membutuhkan peningkatan kapasitas diri, b) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam Pembangunan dan, c) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif *belum dilaksanakan dengan baik dan maksimal* oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Bidang Pariwisata, Pemerintah Desa Tabanio, dan Pengelola Pokdarwis Desa Tabanio.

## Daftar Pustaka

- Herdiana, D. (2019). Desa Wisata Berbasis Masyarakat. *Jumpa*, 6(1), 63–86.
- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Manurung, S.S., Rahmayani, A. (2022). Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Di Objek Wisata Tangkahan. TOBA (Journal of Tourism, Hospitality and Destination). Vol. 1 No. 3 (Agustus 2022) Hal. 141-147.
- Gama, Z.P., Yanuwiadi, B., Kurniawan, N., & Parmawati, R. (2018). Pemetaan Potensi dan Strategi Pengembangan Perkampungan Sungai Wain Kelurahan Karang Joang Sebagai Desa Wisata Klaster Pendamping Pariwisata Berkelanjutan Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW) di Balikpapan. *Journal Of Innovation And Applied Technology*, 4(2), Hal.789–794.
- Hannaji, N. 2022 "Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengembangkan Pariwisata di Desa Wisata Bayan." *Journal Of Responsible Tourism*. Vol. 2 No. 1. 151-159.
- Sinaga, K., Nasution, M. A., & Dewi, A. T. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 8(1), 79–90.
- Santoso, A. A.P. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Wisata di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 7(November), 33–48
- Simamora, A.L.Br., Rangkuti, Z.A., (2024). Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pengembangan Desa Wisata di Nagori Karang Anyar Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 62-73.
- Sulistiyani, (2014). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Sumodiningrat, G. (2014). *Menuju Ekonomi Berdikari*. Jogjakarta. Media Pressindo.
- Miles, M.B., & Huberman, A. M, An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis. Sage Publication. London, 2014.Freire, P. (1972). *Pedagogy of the Oppressed*, Trans. Penguin Book.
- De Lima, Y.A., Prakoso, A.A., (2019). Identifikasi faktor internal dan external yang menjadi penghambat dan pendorong dalam pengembangan pantai Natsepa dengan pendekatan *Community-based Tourism*. *BARISTA: Jurnal Kajian Bahasa dan Pariwisata. Volume 6 Nomor 2, 2019: Hal. 49-65*.
- Agung, N.P., Wibowo, A., Widjianto. (2024). Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Desa Kaliboto oleh Kaliboto Green Institute Melalui Program *Integrated Farming System* dalam Pencapaian SDG's. *Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies: Conference Series Vol. 2 No. 1 (2024)*. Hal. 28-39.
- Anarta, F & Darwis, R.S. (2024). Pentingnya Partisipasi Masyarakat Sebagai Bagian Dari PARIWisata Berbasis Masyarakat Dalam Mengembangkan Desa Wisata. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* Vol. 7 No. 2 Desember 2024 Hal: 212-220.
- Chaplin, J. P., 1997. *Kamus Lengkap Psikologi* . Penerjemah Kartini Kartono. Cet 1. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Robbins. (2000). *Keterampilan Dasar*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Mulyana, Y. (2023). Strategi pengembangan desa wisata berbasis budaya di desa Rancakalong Kabupaten Bandung. *Jurnal PAPATUNG*: Vol. 6 No.1 Tahun 2023. Hal.68-80.
- Maulana, R.F., Asmawi, M.R., Utami. P. (2022). Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Pariwisata Pantai Tanjung Kait di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 6 No. 3 Oktober 2022. Hal. 6297-6301.

- Suherman, E., Pramudiana, I.D., Roekminiati, S., Widyawati. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Pada Wisata Sontoh Laut Asemrowo Kota Surabaya. *Jurnal Inovasi Sektor Publik* Volume 4, Nomor 2, 2024. Hal. 85-101.
- Natalia, N., Mardhalena, A. Ningtias, K. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Desa Bidang Pendidikan di Desa Begori Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang. *Publika, Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Vol. 1, No. 1 Juni 2023. Hal. 1-19.
- Wahyuni, D. (2018). Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Nglangeran, Kabupaten Gunung Kidul. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 9(1), 83- 100